

Laporan Capaian Kinerja Sementara Triwulan III Tahun 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
1	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan					
	Indikator 1.1 Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,3	5,3	5,04	95,09
	Indikator 1.2 Biaya Logistik	Persentase	13,52% terhadap PDB	14,29% terhadap PDB	14,29%** terhadap PDB	100
	Indikator 1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persentase	29,4% terhadap PDB	29,08% terhadap PDB	29,08% terhadap PDB	100
	Indikator 1.4 Rasio PDB Industri Pengolahan	Persentase	20,8%	20,8%	20,8%	100
	Indikator 1.5 Devisa Pariwisata	USD	19,00-22,10 milliar	5,62 milliar	5,62 milliar	100
	Indikator 1.6 Rasio PDB Pariwisata	Persentase	4,5% - 4,6%	3,96%	3,96%	100
	Indikator 1.7 Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,77	6,64	6,64**	100
	Indikator 1.8 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks	43	43	43**	100
2	Sasaran Strategis 2. Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional Sesuai dengan Fundamental Ekonomi					
	Indikator 2.1 Tingkat Inflasi	Persentase	(2,5 ± 1)%	(2,5 ± 1)%	2,65%	100
3	Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan					
	Indikator 3.1 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase	35%	35%	42,20%	116
	Indikator 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,5% - 5%	4,85%	4,85%	100
4	Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					

Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)	3	100
5 <i>Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelaanjutan</i>	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)	3,25 108,33
6 <i>Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas</i>	Indikator 6.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Nilai	90,77	90,77	90,77** 100

* Masih bersifat prediksi berdasarkan target tahunan karena tidak dapat dipecah kedalam triwulan

** Masih menggunakan data triwulan sebelumnya

1

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelaanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis 1: **Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelaanjutan** ditunjukkan oleh pencapaian 8 (Delapan) indikator kinerja yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Biaya Logistik
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Rasio PDB Industri Pengolahan
5. Devisa Pariwisata
6. Rasio PDB Pariwisata
7. Indeks Ketahanan Energi
8. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan yang teramanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta mengantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas tersebut didorong oleh capaian pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga jasa-jasa. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali terdapat isu dan masalah yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing sektor serta tidak dapat diselesaikan antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi saling berbenturan satu sama lain atau overlapping. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diamanatkan pada RPJMN, maka diperlukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelakanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan

untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam kurun periode 1 tahun.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

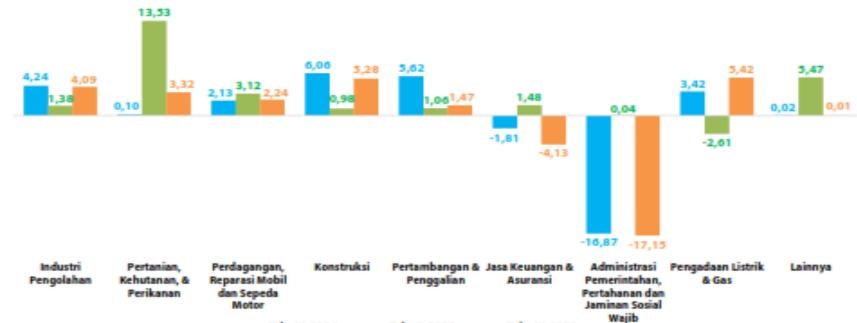
Hasil Pengukuran Kinerja

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah sebesar 5,3% (yoY). Dalam proses perhitungan pertumbuhan ekonomi tahunan, BPS mengeluarkan realisasi pertumbuhan ekonomi secara triwulan. Meski dirilis secara triwulanan, perhitungan capaian indikator pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Capaian pertumbuhan ekonomi triwulanan menjadi pijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengawal target tahunan pertumbuhan ekonomi:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU 1.1 Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,3	5,04	95,09

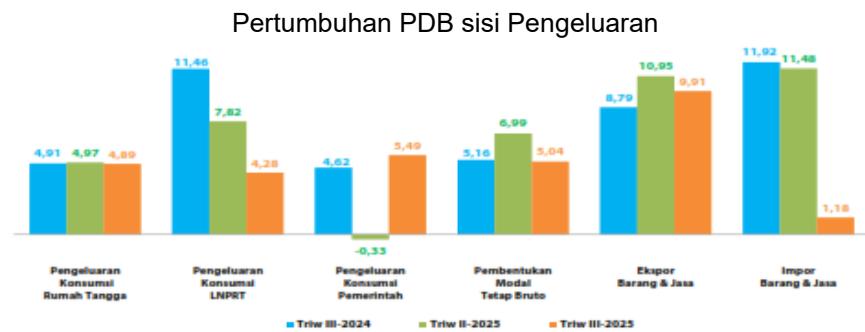
Data BPS menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2025 mencapai Rp 6.060,0 triliun. Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 persen (q-to-q) jika melihat dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Indonesia triwulan III-2025 terhadap triwulan III-2024 tumbuh sebesar 5,04 Persen (Y-on-Y). Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,42 persen; Konstruksi sebesar 5,28 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 4,09 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi diantaranya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,15 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,13 persen.

Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha Y-on-Y



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jsa sebesar 9,91 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 5,49 persen; Komponen PMTB sebesar 5,04 persen; Komponen PK_RT sebesar 4,89 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 4,28 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) juga tumbuh sebesar 1,18 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2025 beberapa kelompok provinsi mengalami penguatan pertumbuhan adalah Pulau Sulawesi sebesar 5,84 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti Pulau Jawa sebesar 5,17 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,90 persen. Sementara itu Pulau Bali dan Nusa Tenggara 4,71 persen; serta Pulau Kalimantan sebesar 4,70 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan terendah tercatat di Kelompok Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,68 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Struktur PDB Sisi Produksi

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan III-2025 didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,15 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,35 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,19 persen; Konstruksi sebesar 9,82 persen; Pertambangan

dan Penggalian sebesar 8,51 persen. Kontribusi kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,02 persen.

Struktur PDB Sisi Pengeluaran

Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 53,14 persen; diikuti oleh komponen PMTB 29,09 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,64 persen; Komponen PK-P sebesar 7,17 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,69 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,29 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang memiliki peran sebesar 20,17 persen.

Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 56,68 persen terhadap PDB nasional kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera dengan Kontribusi 22,42 persen, pulau Kalimantan dengan kontribusi 8,02 persen, pulau Sulawesi dengan kontribusi sebesar 7,36 persen, pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan kontribusi sebesar 2,83 persen, dan Maluku dan Papua dengan kontribusi sebesar 2,69 persen.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Pertumbuhan Ekonomi yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Sinkronisasi dalam bentuk permintaan data terkait Belanja Modal (Capex) triwulan III BUMN kepada Kementerian BUMN.
- b. Koordinasi dengan BPI Danantara terkait monitoring dan pelaporan utilisasi belanja modal BUMN semester I.
- c. Koordinasi tim teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat koordinasi komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM semester II.
- d. Sosialisasi Permenko perubahan keempat tentang kebijakan dan regulasi KUR.
- e. Koordinasi dengan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait kebijakan KUR triwulan III.
- f. Sosialisasi dan Implementasi Penyaluran KUR Tebu dan Kredit Program Perumahan di Bank Jateng.
- g. Koordinasi melalui Rakor arah kebijakan dan isu strategis pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi 2025-2029.
- h. Koordinasi dengan PTPN III dan PT Sinergi Gula Nusantara.
- i. Koordinasi dalam finalisasi Draft Berita Acara Kerja Sama koordinasi percepatan penyediaan pembiayaan utang daerah berbentuk pinjaman daerah untuk pembiayaan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
- j. Koordinasi dengan Deputy Director for Legal Affairs and The OECD Accession Coordinator.
- k. Sinkronisasi dalam persiapan technical review aksesi OECD.
- l. Koordinasi melalui workshop on reporting of development finance and strategic.
- m. Koordinasi evaluasi implementasi pelaksana dan kelompok kerja satgas peningkatan ekspor nasional.

- n. Koordinasi melalui rapat pembahasan pelatihan dengan idEA e-UMKM dengan HIPPIINDO dan APRINDO.
- o. Koordinasi pembahasan Draft Kepmenko tentang kelompok kerja Timnas P3DN.
- p. Koordinasi terkait pembahasan gerakan ASN pakai produk lokal.
- q. Koordinasi dalam rapat teknis persiapan Kick-off road to HARBOLNAS.
- r. Koordinasi dalam rapat tim penyelarasan peraturan bidang pertambangan di wilayah ibu kota negara.
- s. Koordinasi dalam pembahasan mekanisme implementasi carbon capture and storage (CCS).
- t. Koordinasi melalui rapat trilateral JETP antara Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian ESDM.
- u. Koordinasi melalui pembahasan publikasi dan pengelolaan dasbor hasil JUTPI3 2025 di wilayah Jabodetabek.
- v. Koordinasi melalui rapat pembahasan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Subang Smartpolitan.
- w. Koordinasi terkait tindak lanjut isu Working Group Batam Bintan Karimun.
- x. Koordinasi terkait Proyek Strategis Nasional pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri.
- y. Koordinasi terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi PSN pembangunan Fly Over dari dan menuju terminal Teluk Lamong.
- z. Koordinasi terkait PSN Proyek Pariwisata Seribu Pulau Kepulauan Seribu.
- aa. Koordinasi untuk diskusi Teknis Perencanaan Teknis Rencana Rinci Pembangunan KPBPB Bintan Wilayah Kab. Bintan TA 2025.
- bb. Koordinasi terkait Perumusan Rekomendasi DSDAN terkait Penerapan Smart Water Management (SWM) yang berbasis Digitalisasi untuk Pengelolaan Sumber Daya Air.

Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama Triwulan III adalah:

- a. Melambatnya konsumsi rumah tangga yang lesu dan daya beli menurun
- b. Tantangan global proteksionisme dan ekspor tidak merata

Strategi dan Upaya Perbaikan

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan III' Tahun 2025 sebesar 5,04 persen menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Pemerintah meluncurkan program stimulus fiskal dan pembiayaan sektor rill.

- b) Melanjutkan program bantuan sosial kepada masyarakat sebagai pendorong daya beli masyarakat.

1.2 Biaya Logistik

Latar Belakang

Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa.

Menurut BAPPENAS bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara Makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu:

1. Biaya Transportasi
2. Biaya Pergudangan
3. Biaya Penyimpanan Persediaan (Inventory)
4. Biaya Administrasi

Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Biaya Logistik merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Biaya Logistik nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Biaya Logistik

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Biaya Logistik terhadap PDB pada tahun 2025 sebesar 13,52%, data kinerja terkait biaya logistik dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik secara tahunan. Untuk mengukur capaian kinerja adalah dengan membandingkan data biaya logistik tahun saat ini dengan tahun sebelumnya, adapun informasi terkait biaya logistik ini masih bersifat sementara karena masih menggunakan data tahun sebelumnya mengingat data tahun terbaru belum dirilis. Berikut data angka sementara terkait biaya logistik:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.2 Biaya Logistik	Persentase	14,29% terhadap PDB	14,29%*	100*

Sumber BAPPENAS *Angka Sementara

Pada Triwulan III tahun 2025, biaya logistik Indonesia tercatat berada pada kisaran 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan masih tingginya beban logistik nasional jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang umumnya telah berada di bawah 10 persen dari PDB. Meskipun terdapat tren penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya—di mana pada 2018 biaya logistik sempat mencapai 23,8 persen dari PDB—tantangan struktural dan operasional masih membebani sistem logistik nasional.



Berdasarkan dengan grafik di atas dapat dilihat terdapat perbaikan dari Tahun 2018 sampai dengan 2025, dimulai tahun 2018 dengan persentase Biaya Logistik Nasional terhadap PDB sebesar 23,8 persen kemudian terus mengalami perbaikan pada sistem logistik nasional sehingga pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 14,29 persen. Lonjakan biaya logistik pada periode triwulan ini terjadi disebabkan oleh adanya pembatasan mobilitas truk saat perayaan HBKN.

Tingginya biaya logistik nasional tersebut berdampak pada menurunnya daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun ekspor. Biaya logistik yang tinggi menghambat efisiensi rantai pasok dan menurunkan minat investasi di sektor perdagangan dan manufaktur. Selain itu, inefisiensi distribusi juga menyebabkan disparitas harga antarwilayah, yang dapat memicu tekanan inflasi dan mengganggu kestabilan pasokan barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan capaian kinerja di atas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Biaya Logistik yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi meeting Evaluasi Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas dilaksanakan dengan Kick Off Meeting Penyusunan Kajian Strategi Efisiensi Logistik untuk mendukung ekspor dari wilayah timur Indonesia.

- b. Koordinasi kegiatan dalam *Meaningful Participation* RPerpres Penguan Logistik Nasional.
- c. Koordinasi dalam rangkaian pembuatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguan Logistik Nasional.
- d. Sinkronisasi dalam kegiatan Diseminasi Strategi Penguan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik.
- e. Koordinasi dalam kerja sama *Supply Chain* dalam Upgrade Perjanjian ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA).
- f. Koordinasi pembahasan Potensi Kerja Sama Bilateral Indonesia – Arab Saudi dalam hal Jasa Logistik.
- g. Koordinasi dengan kementerian/Lembaga dan penyedia jasa logistik dengan asistensi Bank Dunia membahas pengembangan 4 (empat) indikator kinerja logistik nasional: *Ship Turn Around Time* (STT), *Container Port Dwell Time* (CPDT), *Aviation Import Dwell Time* (AIDT) dan *Postal Delivery Time* (PDT).
- h. Koordinasi *overview* dan diskusi dengan Pelaku Usaha Pemilik Barang dan Pelaku Usaha Penyedia Jasa Logistik (PJL).
- i. Monitoring dan Evaluasi Integrasi Pelabuhan Patimban dengan Jaringan Transportasi Multimoda.

Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama Triwulan III adalah:

- 1. Kondisi Geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga distribusi barang membutuhkan moda transportasi multimoda
- 2. Belum meratanya Infrastruktur logistik khususnya diluar pulau jawa
- 3. Belum optimalnya regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan

Strategi dan Upaya Perbaikan

Biaya Logistik Nasional pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 14,3 persen menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi regulasi terkait dengan sistem logistik nasional
- b. Membangun infrastruktur yang mampu mendukung pengurangan biaya logistik terutama diluar pulau jawa
- c. Memberikan insentif fiskal terhadap pelaku usaha logistik serta menyederhanakan birokrasi terkait dengan perizinan.

1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Latar Belakang

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, mencakup bangunan, mesin dan peralatan. PMTB meliputi investasi produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai aset yang tidak diproduksi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24 jenis barang modal yang termasuk PMTB, yaitu:

- 1. Bangunan Tempat Tinggal

2. Bangunan bukan tempat tinggal
3. Konstruksi lainnya
4. Mesin pembangkit dan penggerak mula
5. Peralatan informasi dan telekomunikasi
6. Mesin lainnya
7. Pesawat terbang dan sejenisnya
8. Kapal dan sejenisnya
9. Kereta api dan sejenisnya
10. Kendaraan bermotor
11. Alat pengangkut lainnya
12. Ternak besar
13. Hewan lainnya
14. Tanaman perkebunan
15. Tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya
16. Tanaman lainnya
17. Barang-barang dari kayu, rotan & bambu
18. Peralatan dari logam
19. Barang dari kain & kulit
20. Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur
21. Peralatan kedokteran dan kesehatan
22. Peralatan lainnya
23. Produk kekayaan intelektual
24. Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi

Beberapa manfaat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negara, antara lain:

- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peran sangat penting bagi negara karena menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat termasuk kebijakan pengalokasian anggaran dan investasi sehingga mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Peningkatan PMTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dalam aset tetap (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.
- Berguna sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis bagi pihak swasta, karena memberikan informasi tentang posisi dan kondisi perekonomian suatu wilayah Negara dan menjadi perkiraan dalam menentukan nilai investasi.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB pada tahun 2025 adalah sebesar 29,4 persen. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Triwulan III tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
-------------------------	--------	---------------	------------------	-----------

Indikator 1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persentase	29,08	29,08	100
---	------------	-------	-------	-----

Sumber: Badan Pusat Statistik. data diolah.

Pada triwulan III tahun 2025, kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan sebesar 5,04 persen (yo). Capaian ini menunjukkan adanya keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional serta komitmen Pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung ekspansi usaha. Belanja modal Pemerintah dan BUMN menjadi pengungkit investasi swasta, terutama dengan beroperasinya Danantara. Investasi Bangunan meningkat 3,02% (yo) dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional serta program prioritas seperti dapur untuk Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, dan program perumahan. Investasi Mesin tumbuh 17% dengan meningkatnya kapasitas produksi dan upaya modernisasi mesin oleh dunia usaha. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa investasi di Indonesia masih bergerak positif, meskipun terdapat perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (Triwulan II 2025) yang mencapai 6,99 persen (yo). Perlambatan pertumbuhan PMTB ini mengindikasikan bahwa laju ekspansi investasi mengalami penyesuaian setelah meningkat cukup tinggi pada paruh pertama tahun 2025. Faktor penyebab perlambatan antara lain adalah berkurangnya realisasi belanja modal pemerintah seiring selesainya proyek strategis semester pertama, serta penyesuaian swasta akibat ketidakpastian global dan nilai tukar yang cenderung fluktuatif.

Meski demikian, secara umum PMTB tumbuh positif, terutama didorong oleh peningkatan impor barang modal seperti mesin dan perlengkapan. Sub-komponen mesin dan perlengkapan mencatat pertumbuhan sebesar 17 persen (yo) serta kendaraan yang tumbuh 6,24 persen.

Dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, PMTB menyumbang 1,59 persen dari total pertumbuhan PDB Indonesia triwulan III 2025 yang sebesar 5,04 persen (yo). Sumbangan ini lebih rendah dibandingkan kontribusi konsumsi rumah tangga dan ekspor, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode ini lebih didorong oleh sektor konsumsi dan perdagangan luar negeri.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan hilirisasi komoditas strategis bersama Bappenas dalam rangka mendukung investasi.
- b. Koordinasi dalam pembahasan penyediaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja rumput laut secara digital dengan dashboard atau laporan Infografis bersama K/L terkait.
- c. Koordinasi pembahasan Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- d. Koordinasi pembahasan Perkembangan Implementasi Regulasi dan Kesesuaian Sistem OSS dengan Perizinan Berusaha pada ketentuan PP No. 28 tahun 2025.

Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama Triwulan III adalah:

1. Adanya ketergantungan pada belanja modal pemerintah hal ini terlihat dari tingginya kontribusi belanja modal pemerintah terhadap peningkatan PMTB
2. Tantangan iklim usaha domestik, kendala birokrasi, perizinan, kepastian hukum, serta isu konsistensi kebijakan masih menjadi faktor penghambat daya tarik investasi.
3. Keterbatasan pembiayaan investasi.

Strategi dan Upaya Perbaikan

Pembentukan Modal Tetap Bruto Indonesia pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 27,82 persen terhadap PDB. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kepastian regulasi terkait dengan investasi.
- b. Mempercepat akselerasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)
- c. Peningkatan kolaborasi pusat dan daerah untuk mempromosi investasi

1.4. Rasio PDB Industri Pengolahan

Latar Belakang

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Badan Pusat Statistik adalah ukuran ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur kinerja atau performa pembangunan, khususnya di bidang ekonomi makro. PDB merupakan ukuran ekonomi makro yang menggambarkan nilai total output akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. PDB digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan (Manufacturing GDP) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah atau negara selama periode tertentu (biasanya per tahun atau triwulan). Industri Pengolahan ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Sektor Industri Pengolahan di Indonesia menjadi salah satu penggerak utama ekonomi sehingga industri ini mampu menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas relatif tinggi.

Rasio PDB Industri Pengolahan adalah persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah atau negara. Indikator ini mengukur sejauh mana sektor industri pengolahan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Rasio PDB Industri Pengolahan merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Rasio PDB Industri Pengolahan yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Rasio PDB Industri Pengolahan.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

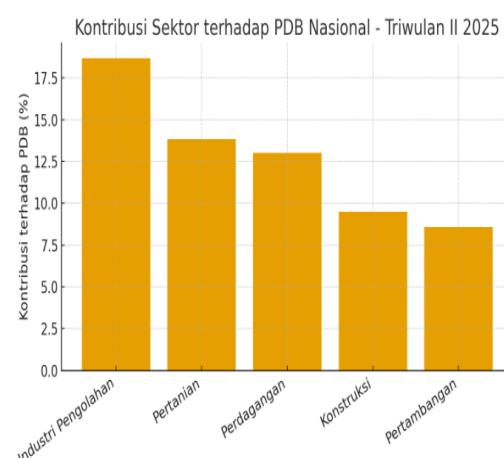
Target Rasio PDB Industri Pengolahan adalah sebesar 20,8 persen pada tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU

Rasio PDB Industri Pengolahan pada Triwulan III tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
Indikator 1.4 Rasio PDB Industri Pengolahan	Persentase	19,15	19,15	100

Sumber: Badan Pusat Statistik. data diolah.

Pada triwulan III tahun 2025, sektor industri pengolahan tetap menunjukkan peran sentral dalam struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 5,54 persen (year-on-year), yang menandai kesinambungan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.



terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode ini.

Dalam struktur PDB nasional, industri pengolahan tetap menjadi bagian dari lima sektor utama yang menyumbang lebih dari 65 persen total nilai tambah bruto nasional, bersama dengan sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Ini mencerminkan konsistensi peran sektor manufaktur sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis produksi.

Pertumbuhan positif sektor industri pengolahan didukung oleh kinerja subsektor unggulan, seperti makanan dan minuman, bahan kimia, farmasi, logam dasar, dan obat tradisional. Meskipun demikian, tantangan global seperti gangguan rantai pasok dan perlambatan permintaan eksternal masih menjadi faktor pembatas yang perlu diwaspada.

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan III 2025 meningkat dan berada pada fase ekspansi (indeks >50%). Hal ini tercermin dari PMI-BI sebesar 51,66%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 50,89%. Berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan PMI-BI didorong oleh ekspansi pada mayoritas komponen yaitu Volume Produksi, Volume Total Pesanan, dan Volume Persediaan Barang Jadi. Berdasarkan sublapangan usaha (Sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar Sub-LU meningkat dan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Mesin dan Perlengkapan, diikuti oleh Industri Pengolahan Tembakau, serta Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), industri pengolahan memberikan sumbangan sebesar sekitar 1,13 persen poin persentase terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,04 persen (yoY) pada periode yang sama. Hal ini menjadikan industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dari sisi produksi

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Rasio PDB Industri Pengolahan yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi terkait industri Agro meliputi:kebijakan industri Agro Bali; implementasi Peta jalan Swasembada Gula; Tarif bea masuk komoditas Almond sebagai bahan baku industri; penguturan regulasi Permendag: industri hasil tembakau dan cukai hasil tembakau; cukai minuman berpemanis dalam kemasan; optimalisasi fasilitas KITE.
- b. Koordinasi terkait industri Kimia dan Farmasi: implementasi Inpres 6/2016; progress revitalisasi dan pengembangan industri pupuk; penghentian impor limbah non B3 plastik daur ulang.
- c. Sinkronisasi terkait Industri tekstil: data impor atas produk TPT dan alas kaki; pemberlakuan BMAD Impor Dumping Benang Filamen; sosialisasi tata cara penerbitan Pertek Impor Tekstil dan Produk Tekstil.
- d. Koordinasi melalui FGD strategi pengembangan industri Tekstil dan pakaian jadi.
- e. Koordinasi pengembangan Industri Pengolahan rumput laut di Kalimantan utara.
- f. Sinkronisasi melalui FGD diskusi penyempurnaan Draft RPerpres dan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru.
- g. Koordinasi penyusunan Joint Declaration of Intent (JDol) on the Trade Promotion Programme for Small and Medium-Sized Industries "Partnering in Business with Germany" (PG).
- h. Koordinasi terkait kerjasama BtoB di bidang semikonduktor dengan Hightech NL Belanda dengan fokus pengembangan ekosistem semikonduktor aspek: rantai pasok global; riset, inovasi dan pengembangan bisnis; photonic integrated circuits (PIC); dan enabling environment.

Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama Triwulan III adalah:

1. Regulasi yang kompleks dan kurang sinkron.
2. Tingginya biaya energi berakibat mahalnya cost production.
3. Masih bergantung pada bahan baku impor jadi adanya tekanan oleh pelemahan rupiah dan kenaikan harga global
4. Minimnya diversifikasi industri dan telatnya hilirisasi industri
5. Tingkat utilitas kapasitas industri belum optimal terutama sektor pada karya.

Strategi dan Upaya Perbaikan

Rasio PDB Industri Pengolahan Indonesia pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 19,15 persen. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan regulasi dan sinkronisasi kebijakan.
- b. Menurunkan biaya energi dan menjamin akses melalui insentif yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Mempercepat transformasi digital dalam manufaktur seperti industri 4.0.
- d. Perluasan insentif fiskal untuk industri berteknologi tinggi dan padat karya.
- e. Mendorong substitusi impor bahan baku dengan peningkatan kapasitas hulu dalam negeri.

1.5. Devisa Pariwisata

Latar Belakang

Devisa Pariwisata adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam menghasilkan devisa negara, khususnya melalui pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) selama kunjungan mereka ke Indonesia dalam periode tertentu. Devisa pariwisata merupakan salah satu indikator strategis dalam menilai kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Secara sederhana, devisa pariwisata menggambarkan besarnya pemasukan negara dari pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berkunjung ke Indonesia. Adapun sumber utama pembentuk devisa pariwisata sebagai berikut:

1. Akomodasi

Pengeluaran wisatawan untuk penginapan adalah salah satu kontributor terbesar devisa pariwisata. Hal ini mencakup pembayaran hotel, vila, resort, guesthouse, hingga homestay. Tingginya permintaan terhadap akomodasi berkualitas mendorong pengembangan industri perhotelan dan membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

2. Makanan dan Minuman (Kuliner)

Kuliner Indonesia yang kaya cita rasa turut menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Dari restoran berbintang hingga warung kaki lima, pengeluaran wisatawan pada sektor makanan dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa, sekaligus mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

3. Transportasi Lokal

Setelah tiba di Indonesia, wisatawan membutuhkan transportasi untuk menjelajahi destinasi wisata. Belanja devisa pada sektor ini mencakup sewa kendaraan, tiket pesawat domestik, angkutan umum, kapal wisata, hingga jasa pemandu. Kualitas dan keterjangkauan moda transportasi mempengaruhi kenyamanan dan lama tinggal wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya pengeluaran mereka.

4. Belanja dan Oleh-oleh

Kegiatan berbelanja menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wisata. Wisatawan biasanya membeli cendera mata, produk kerajinan tangan, pakaian, perhiasan, atau produk khas daerah lainnya. Pengeluaran ini menjadi ladang penghasilan bagi UMKM lokal, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah tujuan wisata.

5. Atraksi dan Rekreasi

Wisatawan juga mengeluarkan uang untuk menikmati berbagai atraksi wisata, seperti tiket masuk objek wisata, pertunjukan budaya, taman hiburan, paket wisata bahari, dan kegiatan petualangan alam. Semakin banyak pilihan atraksi berkualitas, maka semakin besar peluang devisa yang dihasilkan.

6. Jasa Lainnya

Komponen ini mencakup berbagai layanan pendukung seperti jasa tur dan travel, fotografi profesional, spa dan wellness, komunikasi, dan layanan pribadi lainnya. Walaupun porsinya tidak sebesar komponen utama lainnya, jasa ini turut memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus memberikan kontribusi tambahan terhadap devisa.

Dalam perumusannya, IKU ini terdiri dari dua komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam periode tertentu, biasanya dihitung secara tahunan. Angka ini mencerminkan volume wisatawan yang berhasil

ditarik oleh daya tarik destinasi, promosi internasional, serta kemudahan akses masuk ke Indonesia. Komponen kedua adalah rata-rata pengeluaran per wisatawan mancanegara selama kunjungan mereka. Pengeluaran ini mencakup berbagai aktivitas seperti akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, transportasi lokal, rekreasi, belanja oleh-oleh, serta jasa lainnya. Kombinasi dari kedua komponen tersebut—jumlah wisatawan dan besarnya pengeluaran mereka—menghasilkan nilai devisa pariwisata yang digunakan sebagai indikator keberhasilan program pembangunan sektor pariwisata nasional. IKU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja kementerian terkait, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan ekonomi nasional serta pembentukan kebijakan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Devisa Pariwisata terhadap adalah sebesar 19,00 miliar – 22,10 miliar pada tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Devisa Pariwisata pada Triwulan III tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
Indikator 1.5 Devisa Pariwisata	USD	5,62 miliar	5,62 miliar	100

Sumber: Kementerian Pariwisata. Data triwulan III.

Pada triwulan III tahun 2025, sektor pariwisata Indonesia mencatatkan penerimaan devisa sebesar US\$5.624 juta. Angka ini mencerminkan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, realisasi tersebut jika diakumulasi dengan penerimaan pada triwulan I dan II 2025 maka totalnya sampai triwulan III sebesar US\$13.822 juta. Terjadi peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Triwulan II 2025), yang mencapai US\$4.390 juta, atau setara dengan peningkatan sebesar 28,11% secara kuartalan.



Pada Triwulan III 2025, kinerja devisa sektor pariwisata Indonesia menunjukkan capaian yang sangat kuat dan menjadi salah satu penopang pemulihhan ekonomi nasional. Penerimaan devisa pariwisata tercatat mencapai sekitar US\$5,62 miliar, atau menjadi capaian kuartalan tertinggi sejak periode sebelum pandemi. Kenaikan ini mencerminkan pulihnya mobilitas global, meningkatnya minat wisatawan asing terhadap destinasi Indonesia, serta membaiknya kinerja berbagai subsektor pariwisata.

Peningkatan devisa tersebut didorong oleh pertumbuhan signifikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman). Hingga September 2025, kunjungan wisman mencapai 11,43 juta orang, tumbuh lebih dari 10 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Mobilitas wisatawan ini mendorong naiknya aktivitas pada sektor akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, hiburan, serta jasa perjalanan — yang seluruhnya menunjukkan pertumbuhan tinggi pada kuartal laporan.

Meski demikian, kinerja pada awal tahun ini tetap memberikan fondasi yang cukup baik dalam rangka pencapaian target devisa pariwisata nasional tahun 2025 yang dipatok di kisaran US\$19 hingga US\$22,1 miliar. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong diversifikasi destinasi wisata, penguatan desa wisata, serta promosi internasional untuk menarik wisatawan mancanegara berdaya beli tinggi.

Dengan strategi tersebut dan peningkatan tren kunjungan wisatawan menjelang musim liburan pertengahan tahun, diharapkan sektor pariwisata dapat kembali mengakselerasi pertumbuhan devisa dalam kuartal-kuartal berikutnya dan mendukung kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional yang ditargetkan mencapai 4,6% pada akhir tahun 2025.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Devisa Pariwisata yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi bersama K/L terkait dan beberapa perusahaan maskapai penerbangan (airlines) terkait peningkatan konektivitas melalui pembukaan rute dari dan menuju Bangka Belitung (Tanjung Kelayang).
- b. Sinkronisasi terkait alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang ada terkait Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas.
- c. Terlaksananya evaluasi tahun 2024 mengenai KEK Tanjung Kelayang dan Morotai, untuk menetapkan strategi tindak lanjut peningkatan konektivitas dan aksesibilitas.
- d. Koordinasi dalam upaya peningkatan status Bandara HAS Hanadioedin menjadi Bandara Internasional yang ditetapkan dalam regulasi KepMenHub No. 26 Tahun 2025.
- e. Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dalam penyusunan revisi regulasi Badan Otorita Borobudur, Danau Toba dan Labuan Bajo.

Kendala Pencapaian Target

Kendala pencapaian target Devisa Pariwisata pada triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur pariwisata yang belum merata.
2. Masih terpusatnya destinasi utama wisata asing seperti Bali, Lombok, dan Jogja.
3. Promosi branding global terkait wisata di Indonesia masih belum terintegrasi

Strategi dan Upaya Perbaikan

Devisa Pariwisata Indonesia pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar USD5,62 miliar menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Mendorong diversifikasi destinasi wisata di daerah yang memiliki potensi wisata
- b. Melakukan penguatan program masyarakat untuk mengembangkan desa wisata
- c. Menggiatkan promosi wisata di event international

1.6. Rasio PDB Pariwisata

Latar Belakang

Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang digunakan untuk mengukur kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi signifikansi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian nasional dan sebagai parameter keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis output riil.

IKU ini didasarkan pada pendekatan Tourism Satellite Account (TSA), sebuah kerangka statistik internasional yang dikembangkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bersama lembaga-lembaga global seperti OECD dan Eurostat. Dalam TSA, hanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permintaan wisatawan yang diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi PDB pariwisata. Dengan demikian, IKU Rasio PDB Pariwisata tidak hanya mencerminkan jumlah wisatawan, melainkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari interaksi konsumsi wisatawan dengan industri-industri yang menyediakan barang dan jasa wisata.

Nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti:

- a. Akomodasi
- b. Makanan dan minuman
- c. Transportasi
- d. Agen perjalanan dan tour operator
- e. Aktivitas budaya dan rekreasi
- f. Industri suvenir dan kerajinan terkait wisata

Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik permintaan wisatawan (manacanegara dan domestik), sehingga indikator ini benar-benar menggambarkan kontribusi ekonomi nyata (real economic impact) dari sektor pariwisata.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Rasio PDB Pariwisata adalah sebesar 4,5 – 4,6 pada tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Rasio PDB Pariwisata pada Triwulan III tahun 2025 menggunakan data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
Indikator 1.6 Rasio PDB Pariwisata	Persentase	3,96	3,96	100

Sumber: Kementerian pariwisata. 15 November.

Pada Triwulan III 2025, sektor pariwisata kembali menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian nasional. Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai sekitar 3,96 persen, menegaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu motor penggerak sektor jasa di Indonesia.

Capaian tersebut selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata selama tahun 2025, yang ditandai oleh bertambahnya kunjungan wisatawan mancanegara, penguatan sektor transportasi dan akomodasi, serta tumbuhnya industri hiburan dan rekreasi. Kombinasi faktor ini turut mendorong peningkatan output ekonomi dari ekosistem pariwisata, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan nasional.

Secara lebih luas, rasio 3,96 persen menunjukkan bahwa hampir empat persen dari total nilai tambah perekonomian Indonesia selama periode triwulan ini berasal dari aktivitas pariwisata. Meski kontribusinya belum sebesar sektor-sektor utama seperti industri pengolahan dan perdagangan, namun pariwisata tetap menjadi sektor strategis yang mampu mendorong diversifikasi PDB, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan devisa.

Kinerja ini juga menunjukkan bahwa pemulihan pariwisata pascapandemi berada pada jalur yang positif. Dengan membaiknya konektivitas, semakin banyaknya acara internasional di Indonesia, serta pengembangan destinasi prioritas, kontribusi pariwisata terhadap PDB diharapkan terus meningkat pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan capaian kinerja di atas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Rasio PDB Pariwisata yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Terlaksananya pembahasan terkait masalah yang ada dan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
- b. Koordinasi dalam pembahasan berbasis riset mengenai tren pariwisata, daya dukung lingkungan dan sosial, serta model bisnis berkelanjutan untuk sektor amenitas di sekitar destinasi utama seperti candi.
- c. Koordinasi terkait pembahasan RPermenko Tata Kelola candi Borobudur
- d. Koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi Progress dan Kendala yang dihadapi KEK Pariwisata Tahun 2025.
- e. Sinkronisasi melalui RDP Pembahasan DIM RUU Kepariwisataan.
- f. Koordinasi melalui rapat Stimulus Diskon Transportasi.
- g. Koordinasi melalui diskusi potensi pengembangan pariwisata bersama ADB.
- h. Penghitungan Indikator Quality Tourism.

Kendala Pencapaian Target

Kendala pencapaian target Rasio PDB Pariwisata selama triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya ketergantungan terhadap musim dan hari libur nasional
2. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas
3. Belum optimalnya investasi pariwisata di daerah-daerah

Strategi dan Upaya Perbaikan

Rasio PDB Pariwisata Indonesia pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 3,96 persen menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Memperkuat dan memperluas konektivitas serta aksesibilitas ke tempat wisata yang potensial
- b. Digitalisasi dan pemasaran wisata berbasis teknologi masakini
- c. Penguatan investasi dan ekosistem industri pariwisata tanah air

1.7. Indeks Ketahanan Energi

Latar Belakang

Indeks Ketahanan Energi adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin

pasokan energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata, guna mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks ini merepresentasikan kinerja sistem energi dari berbagai aspek strategis, seperti ketersediaan energi (availability), aksesibilitas dan keterjangkauan (accessibility and affordability), ketergantungan energi terhadap luar negeri (security), efisiensi dan keberlanjutan lingkungan (sustainability), serta diversifikasi sumber energi.

1. Availability (Ketersediaan): menilai sejauh mana cadangan dan pasokan energi (primer dan final) cukup untuk kebutuhan nasional.
2. Accessibility: mengukur keterjangkauan infrastruktur dan distribusi energi oleh masyarakat dan industri.
3. Affordability (Keterjangkauan Harga): menilai kemampuan masyarakat untuk membeli energi dengan harga yang wajar.
4. Security (Ketahanan Pasokan): mengukur ketergantungan terhadap impor energi dan kemampuan menghadapi gangguan eksternal.
5. Sustainability & Efficiency: mengukur proporsi energi baru terbarukan, efisiensi penggunaan energi, dan dampak lingkungan dari sistem energi.
6. Diversifikasi Energi: menilai tingkat variasi sumber energi nasional untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis sumber.

Indeks Ketahanan Energi bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor seperti berikut: memberikan alat ukur yang objektif dan komprehensif untuk mengevaluasi ketahanan energi nasional dari sisi teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan; mendukung perumusan kebijakan energi yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi masa depan, termasuk dalam perencanaan transisi energi nasional; memfasilitasi monitoring dan evaluasi program serta investasi energi agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna; mengantisipasi risiko dan gangguan pasokan energi, serta meningkatkan kapasitas respons dan mitigasi melalui diversifikasi dan efisiensi; memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial nasional dengan sistem energi yang handal, adil, dan berkelanjutan; mendorong investasi dan inovasi di sektor energi, dengan memberikan kepastian dan gambaran risiko kepada pelaku usaha.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Indeks Ketahanan Energi adalah sebesar 6,77 pada tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Indeks Ketahanan Energi pada Triwulan III tahun 2025 menggunakan data tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
Indikator 1.7 Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,64	6,64*	100*

Sumber: Dewan Energi Nasional. 2024.

*Angka sementara

Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori tahan (skor 6 hingga 7,99). Hal ini dapat dilihat dari indeks ketahanan energi RI dengan capaian skor 6,64. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mencapai indeks ketahanan energi yang ideal dengan skor 7 bahkan 10. Dalam mengukur indeks ketahanan energi, para pakar energi menggunakan 4 aspek yakni, availability, accessibility, affordability dan acceptability.

Terkait affordability, Indonesia masih memberikan harga subsidi baik batubara untuk PT PLN (Persero), elpiji, serta bensin masih pemerintah yang menetapkan harga.

Hingga pada Triwulan III 2025, Indonesia terus meneruskan upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Meskipun pada periode ini skor resmi Indeks Ketahanan Energi dari Dewan Energi Nasional (DEN) untuk belum dirilis, Indonesia cukup kuat menghadapi tantangan energi, namun masih perlu penguatan dalam efisiensi dan pemanfaatan energi bersih. Pemerintah berkomitmen mempercepat transisi menuju energi bersih melalui dua langkah utama, yaitu menggandakan upaya efisiensi energi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan hingga tiga kali lipat dari kondisi saat ini.

Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia mencapai 3.687 gigawatt (GW), dengan sumber terbesar berada di Sumatera, disusul Jawa dan Kalimantan. Dari total tersebut, energi surya menjadi kontributor terbesar, diikuti tenaga angin 155 GW, tenaga air 95 GW, bioenergi 57 GW, energi laut 63 GW, dan Panas Bumi sekitar 24 GW. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 44 persen pada 2030.

Pengukuran ketahanan energi sendiri selain menggunakan aspek 4A (availability, affordability, accessibility, dan acceptability) juga menggunakan metode pembobotan menggunakan AHP (analisa hierarchy process). Dengan mempertimbangkan pencapaian infrastruktur dan kebijakan energi hingga akhir Q3 2025, diyakini bahwa ketahanan energi nasional tetap berada pada kategori Tahan, dengan kemungkinan peningkatan lebih lanjut menuju kategori ideal sesuai target DEN.

Berdasarkan capaian kinerja di atas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Indeks Ketahanan Energi yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi terkait tim gabungan penanganan sumur minyak masyarakat.
- b. Koordinasi terkait RPerpres tentang perubahan atas Perpres Nomor 40 tahun 2023.
- c. Sinkronisasi melalui Harmonisasi RPP perubahan atas PP 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Koordinasi terkait alternatif sumber pengganti gas jambaran Tiung Biru
- e. Koordinasi terkait penyeimbang neraca perdagangan sektor migas dengan Amerikat Serikat.
- f. Koordinasi dalam pembahasan tindak lanjut rencana impor sektor energi dan pembelian pesawat dari Amerika Serikat.
- g. Koordinasi pembahasan Revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.
- h. Terbitnya izin prakarsa atas perubahan Perpres 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
- i. Terselesaikannay konsep naskah urgensi penyusunan RPerpres penugasan pembelian energi dari AS.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Indeks Ketahanan Energi pada triwulan III sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil
2. Realisasi energi baru terbarukan yang masih rendah
3. Infrastruktur energi belum merata dan rentan

Strategi dan Upaya Perbaikan

Indeks Ketahanan Energi Indonesia pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 6,64 menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemanfaatan EBT dalam bauran energi
- b. Mempercepat pemanfaatan kendaraan listrik secara luas
- c. Meningkatkan kapasitas kilang minyak dan produksi minyak bumi.

1.8. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global

Latar Belakang

IKU Indeks Daya Saing Digital adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas digital suatu negara—termasuk Indonesia—dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi di era transformasi digital global. Diukur oleh lembaga internasional seperti IMD (International Institute for Management Development) dan WEF (World Economic Forum), indeks ini merefleksikan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal digitalisasi ekonomi, teknologi, SDM digital, dan kesiapan infrastruktur.

Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kualitas sumber daya manusia digital, ekosistem inovasi digital, kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Melalui pengukuran ini, Indonesia dapat mengetahui posisi relatifnya dibandingkan negara lain di dunia dalam hal perkembangan dan daya saing digital. Indeks ini menjadi alat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, serta program yang bertujuan meningkatkan ekosistem digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, dan mempercepat inklusi digital secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global adalah parameter strategis yang menilai efektivitas dan kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.

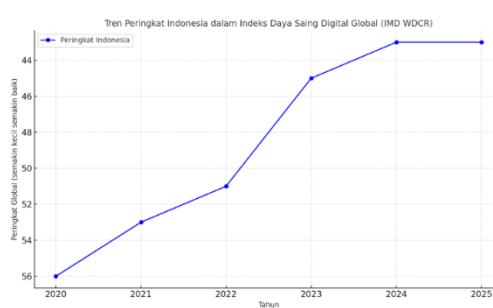
Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global adalah sebesar 43 pada tahun 2025. Hasil Akhir IKU Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global pada Triwulan III tahun 2025 dikeluarkan oleh International Institute for Management Development (IMD). Hingga laporan ini dikeluarkan, IMD masih belum mengeluarkan hasil penilaianya sehingga capaian triwulan III menggunakan data sebelumnya dengan hasil sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
Indikator 1.8 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks	43	43*	100

*angka tahun 2024

Pada triwulan III tahun 2025 sementara masih menggunakan data 2024, secara perkembangan Indonesia menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya memperkuat daya saing digital di tingkat global. Berdasarkan rilis tahun 2024 dari IMD World Digital Competitiveness



sejaknya terfokus dan partisipasi aktif sektor swasta dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Perbaikan kinerja tersebut terutama didorong oleh keunggulan Indonesia dalam beberapa aspek strategis. Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia dalam pemanfaatan big data dan digitalisasi layanan keuangan, peringkat ke-3 dalam investasi sektor telekomunikasi, serta peringkat ke-5 dalam aktivitas pendanaan inovasi melalui venture capital. Sektor keuangan digital, infrastruktur komunikasi, serta adopsi teknologi oleh pelaku usaha menjadi pendorong utama penguatan daya saing digital nasional.

Secara regional, Indonesia berada di peringkat ke-4 di Asia Tenggara, setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand, namun berada di atas Filipina. Dengan skor keseluruhan sebesar 61,36, capaian ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang konsisten, masih dibutuhkan terobosan kebijakan yang lebih kuat untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan capaian kinerja di atas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi dalam *Kick Off* pembahasan keikutsertaan Indonesia dalam Event dan Business Matching pada *4th Global Digital Trade Expo (GDTE) 2025*.
- b. Koordinasi dengan Bank Indonesia terkait laporan volume transaksi e-commerce yang diterbitkan tahunan.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global yang dihadapi pada triwulan III sebagai berikut:

1. Masih belum memadainya akses dan kualitas infrastruktur digital
2. Masih rendahnya kecepatan internet pita lebar disertai dengan rendahnya penetrasi broadband.
3. Masih rendahnya kualitas pendidikan teknologi dan pelatihan SDM digital diikuti dengan minimnya kontribusi riset terutama untuk kecerdasan buatan (AI)

Strategi dan Upaya Perbaikan

Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global pada Triwulan III Tahun 2025 berada pada peringkat 43 menjadi salah satu pendorong upaya

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akselerasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital
- b. Perluasan akses internet berkualitas dan cepat
- c. Meningkatkan kompetensi talenta digital melalui program pendidikan yang berfokus pada kecerdasan buatan atau AI

2

Sasaran Strategis 2: Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi

Pencapaian Sasaran Strategis 2: **Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Tingkat Inflasi

2.1 Tingkat Inflasi

Latar Belakang

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi supply, sisi demand, dan ekspektasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan rill masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan.

Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian.

Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terhaganya inflasi di kisaran antara lain:

- A. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
- B. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- C. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut:

- (1) Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target
- (2) Cadangan beras pemerintah
- (3) Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

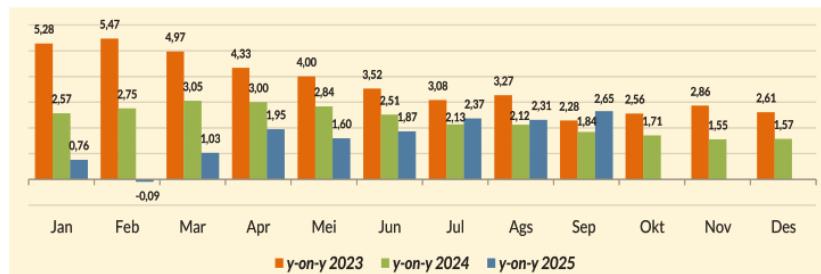
Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar $2,5 \pm 1$, data kinerja terkait inflasi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik secara bulanan. Untuk mengukur capaian kinerja triwulanan adalah dengan membandingkan inflasi secara *year-on-year* yang baru dapat diperoleh datanya pada setiap bulan ketika bulan tersebut sudah lewat. adapun perhitungan capaian kinerja ini dengan membandingkan inflasi pada bulan September 2025 dengan September 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU 2.1. Tingkat Inflasi	Persentase	$2,5 \pm 1$	2,65	100%

Inflasi September 2025 tercatat 2,65% (yoY) berada dalam kondisi stabil sejak Juni 2025. Realisasi tersebut didukung dan pergerakan komponen inflasi inti (*Core*), komponen *Administered Price* (AP) dan *Volatile Food* (VF) yang mengalami inflasi. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,32 persen dan terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,99 persen. Deflasi provinsi *y-on-y* terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,17 persen. Sedangkan Inflasi tertinggi Kabupaten/Kota *y-on-y* tertinggi terjadi di Deli Serdang sebesar 6,81 persen dan terendah terjadi di Kota Ternate sebesar 0,06 persen. Deflasi Kabupaten/Kota *y-on-y* terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1,21 persen.

Grafik.1 Perkembangan Inflasi 2023 - 2025

Tingkat Inflasi	2023		2024		2025	
	(1)	(2)	(3)	(4)		
Month-to-Month (M-to-M)		0,19	-0,12	0,21		
Year-to-Date (Y-to-D)		1,63	0,74	1,82		
Year-on-Year (Y-on-Y)		2,28	1,84	2,65		



Inflasi bulanan selama tahun 2025 ini dari Januari hingga September, inflasi tercatat sebesar 0,21 (mtm), inflasi yang cukup tinggi meskipun dalam rentang secara bulanan pada September 2025 dipengaruhi oleh adanya pergerakan secara bulanan yang masih terkendali dari inflasi inti dimana inflasi inti tercatat sebesar 0,18%, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,07% (mtm), terutama disumbang oleh peningkatan harga komoditas emas perhiasan dan biaya kuliah akademi/permuruan tinggi. Kelompok *Administered Price* (AP) dan kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 0,06% dan 0,52% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,08% untuk *Administered Price* (AP) dan untuk volatile food lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,61% (mtm). Inflasi kelompok *Administered Price* (AP) disumbang terutama oleh komoditas sigaret kretek masin (SKM) dan tangan seiring dengan kenaikan harga eceran rokok. Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas aneka cabai dan daging ayam ras.

Tabel.1 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (%)

Komponen	IHK September 2024	IHK Desember 2024	IHK September 2025	Tingkat Inflasi M-to-M September 2025 (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D September 2025 (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y September 2025 (%)	Andil Inflasi M-to-M September 2025 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y September 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	105,93	106,80	108,74	0,21	1,82	2,65	0,21	2,65
Inti	104,76	105,35	107,05	0,18	1,61	2,19	0,11	1,41
Harga Diatur Pemerintah	108,91	108,80	110,11	0,06	1,20	1,10	0,01	0,21
Bergejolak	107,16	110,39	114,06	0,52	3,32	6,44	0,09	1,03
Energi	107,44	106,95	107,32	-0,01	0,35	-0,11	~0	-0,01
Bahan Makanan	106,35	109,29	112,54	0,44	2,97	5,82	0,09	1,16

1. Perkembangan inflasi inti pada September 2025 tercatat sebesar 0,18% (mtm), relatif lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,06% (mtm). Realisasi inflasi inti tersebut disumbang terutama oleh beberapa komoditas emas perhiasan dan biaya kuliah akademi/permuruan tinggi. Secara tahunan, inflasi inti September 2025 tercatat sebesar 2,19% (yoy), sedikit lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,17% (yoy).

2. Pada September 2025, komponen VF mengalami inflasi sebesar 0,52% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,61% (mtm). Inflasi kelompok *volatile food* disumbang terutama oleh komoditas aneka cabai dan daging ayam ras seiring dengan pasokan yang terbatas akibat berakhirnya masa panen dan peningkatan biaya input produksi. Secara tahunan, kelompok *volatile food* mengalami inflasi sebesar 6,44% (yo), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 4,47% (yo). Ke depan, inflasi *volatile food* diprakirakan tetap akan terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia, TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah.
3. Inflasi komponen *Administered Prices* (AP) pada September 2025 mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm). Inflasi kelompok *administered prices* disumbang terutama oleh komoditas sigaret kretek mesin dan tangan seiring dengan berlanjutnya kenaikan harga jual eceran rokok. Secara tahunan, inflasi kelompok *administered prices* tercatat sebesar 1,10% (yo), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,00% (yo).

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Tingkat Inflasi yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Tersusunya serta tersampaikannya laporan inflasi kepada Presiden melalui surat Menko Perekonomian nomor:B/EK.02.05/196/M.EKON/07/2025.
- b. Penyampaian surat permohonan pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD dari Menko Perekonomian kepada Presiden melalui surat Nomor: PK.TPID/255/M.EKON/09/2025 tanggal 22 September 2025.
- c. Tersusunya peta jalan pengendalian inflasi dan dapat diakses melalui website *tpin.id*.
- d. Terlaksananya laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Triwulan II termasuk pelaksanaan Rakor/HLM TPIP-TPID telah disampaikan kepada Presiden melalui Surat Menko Perekonomian Nomor: B/EK.02.05/196/M.EKON/07/2025 tanggal 22 Juli 2025.
- e. Penyampaian Surat Bersama Menko Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia terkait Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025 berdasarkan Surat Menko Nomor EK.02.05/55/D.I.M.EKON/07/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Inflasi yang dihadapi pada triwulan III sebagai berikut:

1. Adanya lonjakan harga pangan akibat penurunan pasokan yang disebabkan berakhirnya musim panen serta peningkatan biaya input produksi
2. Adanya penyesuaian harga terhadap barang yang diatur oleh pemerintah
3. Harga komoditas emas global yang mengalami kenaikan

Strategi dan Upaya Perbaikan

Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target Tingkat Inflasi tersebut sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi TPIP – TPID melalui High Level Meeting dan Rakornas dengan fokus pada pengendalian harga pangan, kelancaran distribusi, dan mengurangi disparitas harga antarwilayah.
- b. Stimulus fiskal seperti subsidi transportasi dan bantuan langsung untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat
- c. Kebijakan moneter yang responsif dan terukur

3

Sasaran Strategis 3: *Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan BerkelaJutan.*

Pencapaian Sasaran Strategis 3: **Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan BerkelaJutan** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

3.1 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Latar Belakang

Lapangan kerja adalah kesempatan atau tempat bagi seseorang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, baik di sektor formal maupun informal, sesuai dengan keahlian, pendidikan, atau keterampilan yang dimilikinya. Sementara itu, Lapangan kerja formal adalah jenis pekerjaan yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan umumnya memiliki perlindungan hukum serta hak-hak tenaga kerja yang jelas. Beberapa ciri-ciri lapangan kerja formal: Status hukum jelas; perjanjian kerja tertulis; upah minimum dan jaminan sosial; jam kerja dan cuti diatur; pajak dan iuran dibayarkan.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal merupakan persentase peningkatan lapangan kerja formal dibandingkan dengan total peningkatan lapangan kerja (formal dan informal) dalam suatu periode waktu tertentu. Proporsi ini tidak hanya mengukur kuantitas lapangan kerja yang diciptakan, tetapi juga kualitasnya. Penyediaan lapangan kerja yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pekerjaan yang tersedia, tetapi juga seberapa banyak dari pekerjaan tersebut yang memenuhi standar formal. Proporsi lapangan kerja formal yang tinggi dapat menciptakan lingkaran positif. Pekerja formal memiliki daya beli yang lebih tinggi, yang mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Proporsi Lapangan Kerja Formal merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Proporsi Lapangan Kerja Formal yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Proporsi Lapangan Kerja Formal.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal pada tahun 2025 sebesar 35 persen, data kinerja terkait Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sakernas. Adapun perhitungan capaian kinerja IKU ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dengan hasil sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
Indikator 3.1 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Percentase	35	42,20	116

Pada Triwulan III 2025, proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja formal terhadap total penduduk bekerja mencapai 42,20%, mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 42,05%.



Peningkatan ini mencerminkan bahwa penciptaan lapangan kerja baru selama setahun terakhir cenderung mengarah ke sektor formal, yang biasanya ditandai dengan keteraturan hubungan kerja, upah yang lebih pasti, serta perlindungan sosial yang lebih baik. Pertumbuhan lapangan kerja formal ini antara lain didorong oleh pemulihhan aktivitas sektor industri pengolahan, jasa keuangan, transportasi, serta peningkatan investasi di berbagai wilayah.

Walaupun kenaikannya tidak terlalu besar, tren ini menandakan adanya pergeseran positif dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia yang selama ini didominasi sektor informal. Namun demikian, upaya untuk memperluas lapangan kerja formal tetap perlu diperkuat melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, percepatan transformasi digital di UMKM, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja agar dapat terserap pada pekerjaan yang lebih produktif.

Secara keseluruhan, peningkatan proporsi lapangan kerja formal ini menjadi indikator penting dalam upaya memperkuat kualitas tenaga kerja nasional. Ke depan, akselerasi penciptaan lapangan kerja formal akan menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja, produktivitas nasional, dan daya saing ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi Penyusunan dan Pengesahan PP 36/2025 tentang Perubahan atas PP 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025.
- b. Koordinasi melalui Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal yang dihadapi pada triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi sektor informal yang masih tinggi
2. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal
3. Pertumbuhan lapangan kerja formal membutuhkan kompetensi khusus.

Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal tersebut sebagai berikut:

- a. Mendorong pertumbuhan sektor penyerap tenaga kerja formal seperti pada industri manufaktur, konstruksi, dan jasa modern
- b. Peningkatan kualitas dan keseusaian keterampilan SDM
- c. Mempercepat transformasi digital UMKM agar mampu menciptakan lapangan kerja sektor formal

3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Latar Belakang

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dihitung sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mencari kerja. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah/negara pada periode tertentu. Tingkat Pengangguran Terbuka mengukur seberapa besar persentase angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan adanya banyak orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan faktor penting yang mempengaruhi penyediaan lapangan kerja suatu negara. Ketika pengangguran tidak bisa teratasi dengan baik tentunya lapangan kerja akan semakin minim karena adanya ketidakseimbangan antara kedua faktor tersebut. Tingginya tingkat pengangguran tentunya pasti akan mempengaruhi lapangan kerja dan menjadi penganggu bagi tercapainya tujuan negara.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan variabel makro ekonomi yang

bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka ini pada tahun 2025 sebesar 4,5 - 5 persen, data kinerja terkait Tingkat Pengangguran Terbuka dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sakernas. Adapun perhitungan capaian kinerja ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dengan hasil sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
Indikator 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 - 5	4,85	100

Pada triwulan III tahun 2025 (berdasarkan Sakernas Agustus 2025), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 4,85% dari total angkatan kerja nasional. Angka ini menunjukkan penurunan tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Agustus 2024) yang sebesar 4,91%, mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja secara nasional.



Meskipun secara persentase terjadi penurunan, jumlah penganggur secara absolut mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 7,46 juta orang, atau menurun sekitar 1.000 orang (13,38%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai derah, perkembangan usaha mikro dan kecil, serta perbaikan iklim usaha yang mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja.

Penurunan TPT ini sekaligus menjadi indikasi bahwa pemulihan ekonomi nasional mulai memberi dampak pada dunia kerja, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dalam hal penciptaan kerja berkualitas, terutama bagi angkatan kerja muda dan lulusan pendidikan menengah ke atas. Kemudian adanya mismatch keterampilan dan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing dipasar kerja yang terus mengalami transformasi.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi percepatan transisi kartu prakerja
- b. Sinkronisasi melalui program magang lulusan Perguruan Tinggi dan telah diterbitkan Permenaker 8/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.
- c. Sinkronisasi dalam rangka meningkatkan pelindungan tenaga kerja platform, telah dilaksanakan FGD arah kebijakan dan Tata Kelola Pekerjaan Berbasis Platform Digital Dalam Rangka Menjaga Pertumbuhan.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan yang dihadapi untuk pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka pada triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peningkatan jumlah angkatan kerja dari periode sebelumnya yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja.
2. Adanya ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan lapangan kerja yang tersedia.

Adapun beberapa strategi dan upaya yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 agar target Tingkat Pengangguran Terbuka dapat tercapaian adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja formal yang semakin dinamis.
- b. pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat sektor-sektor strategis penyerap tenaga kerja.
- c. Reformasi regulasi ketenagakerjaan dan iklim investasi

4

Sasaran Strategis 4: *Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 4 : ***Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*** ditunjukkan dan dihitung berdasarkan capaian 1 indikator kinerja yakni Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam pelaksanaannya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Menteri yang bertanggung jawab atas Indeks Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi Pengendalian adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan

pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

1. Kebijakan terkait Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Kebijakan terkait Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Kebijakan terkait Penyelesaian Penugasan Pemerintah
4. Kebijakan terkait Tingkat Inflasi
5. Kebijakan terkait Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital
6. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Bilateral
7. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Regional
8. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral
9. Kebijakan terkait Kerja Sama Investasi dan Hilirisasi
10. Kebijakan terkait Ekonomi Makro dan Fiskal
11. Kebijakan terkait Digital Economy Framework Agreement
12. Kebijakan terkait Program Belanja Masyarakat
13. Kebijakan terkait Pengendalian Impor
14. Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara, dan Rel
15. Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
16. Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
17. Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
18. Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri
19. Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
20. Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
21. Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
22. Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
23. Kebijakan terkait Pengembangan Biofuel
24. Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
25. Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
26. Kebijakan terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara
27. Kebijakan terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
28. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
29. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
30. Kebijakan terkait Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
31. Kebijakan terkait Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
32. Kebijakan terkait Pengembangan Pariwisata

Adapun Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bussiness yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tahapan 1. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait kebijakan perekonomian dan menetapkan

fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun kedepan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Dokumen Identifikasi dan Penetapan ruang lingkup yang diselesaikan
2. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy Brief
3. Telaah staf tentang urgensi penanganan isu

Tahapan 2. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan alternatif rekomendasi yang berisikan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy brief
2. Telaah staf tentang kebijakan yang diambil

Tahapan 3. Pada Tahapan ini dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Bukti penyelenggaraan rapat koordinasi berupa Notula, surat deputi
2. Rancangan kebijakan seperti: RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko dan RPermen

Tahapan 4. Pada tahapan ini evaluasi dan monitoring kebijakan dilakukan terhadap rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dalam proses sinkronisasi dan koordinasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi kebijakan dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Laporan monitoring dan evaluasi kebijakan
2. Laporan hasil evaluasi kebijakan
1. Dokumen/kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian adalah sebesar 3 dari 4. Indeks ini merupakan hasil perhitungan yang didapat dengan setelah melalui formulasi yang menghimpun nilai dari seluruh Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hingga akhir triwulan III Tahun 2025 dapat dilakukan perhitungan dengan formulasi sehingga didapat nilai Indeks 3:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU 4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3	100

Nilai diatas bersifat *self assessment* yang didapat berdasarkan dengan dokumen yang dihasilkan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada seluruh unit kerja Kedeputian. Keberhasilan indikator Efektivitas Sinkronisasi, koordinasi dan Pengendalian Kebijakan

Perekonomian merupakan cerminan keberhasilan seluruh Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal isu strategis terkait perekonomian. Berikut merupakan kegiatan terkait efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antara lain:

1. Koordinasi rekomendasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN tahun 2025 melalui monitoring pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada Perum Damri cabang Serang.
2. Tersusunya rekomendasi kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.
3. Koordinasi terkait proses reimbursement Stimulus diskon transportasi.
4. Koordinasi dalam high level meeting evaluasi standardisasi Fasilitasi Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas dalam rangka pembahasan rumusan batang tubuh dan Rencana Aksi RPerpres Penguatan Logistik Nasional.
5. Koordinasi dalam program GASPPoL (Gerakan ASN Pakai Produk Lokal) dan persiapan Kick Off Road to Harbolnas 2025.
6. Koordinasi kegiatan Conference and Exhibition Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI CONVEX).
7. Sinkronisasi terkait kebijakan Tarif Resiprokal AS.
8. Koordinasi kegiatan Pembukaan Indonesia Retail Summit 2024 “Navigating the Future of Retail: Strategies for Competitiveness and Innovation”
9. Sinkronisasi dalam peluncuran Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) dengan *pilot project* di Kuningan.
10. Koordinasi Pembahasan Usulan Pengenaan BMAD Impor PP Copolymer dari Republik Korea, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.
11. Koordinasi Pembahasan Ketentuan Perdagangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
12. Sinkronisasi terkait Kajian Strategi Efisiensi Logistik untuk mendukung Ekspor dari Wilayah Timur Indonesia.
13. Koordinasi terkait pembahasan revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.
14. Sinkronisasi terkait Harmonisasi RPP atas Perubahan PP 96/2021 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara.
15. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program desa berlistrik.
16. Koordinasi rapat Trilateral JETP antara Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian ESDM.
17. Koordinasi terkait usulan Proyek Strategis Nasional 2026 serta rapat penyusunan dan harmonisasi peraturan perubahan Permenko Perekonomian No. 7/2021 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional.
18. Sinkronisasi melalui rapat klarifikasi Perpres No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
19. Sosialisasi terkait kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat.

20. Pengendalian untuk temuan dengan ombudsman terkait saran perbaikan pencegahan maladministrasi pada layanan distribusi LPG bersubsidi 3Kg.
21. Terlaksananya rapat Tim Penyelaras Peraturan Bidang Pertambangan di Wilayah Ibu Kota Nusantara.
22. Koordinasi rapat RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
23. Koordinasi terkait perkembangan penyusunan regulasi dan kesesuaian Sistem OSS terkait Perizinan Berusaha Seluruh Sektor pada PP 28/2025.
24. Terbitnya Permenko 16/2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko 7/2021 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional.
25. Terselesaikannya konsep naskah urgensi penyusunan RPerpres penugasan pembelian energi dari AS.
26. Pengendalian melalui audiensi dengan PT HM Sampoerna; PT Bentoel; PT Tri Sakti Purwosari Makmur (TSPM KT&G) terkait kebijakan IHT.
27. Pengendalian melalui audiensi dengan PT Nojorono Tobacco Internasional terkait terbitnya Permenko Bidang PMK No. 2 Tahun 2025 tentang Koordinasi Penetapan Batas Nikotin dan Tar.
28. Pengendalian melalui audiensi dengan PT PepsiCo Indonesia Food & Beverages bertujuan untuk membahas Program Kemitraan Pertanian PepsiCo dan Petani Lokal.
29. Koordinasi pembahasan Inpres 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang masih relevan dengan kebijakan industri saat ini.
30. Koordinasi untuk pemenuhan bahan baku industri elektronika, yakni Rapat koordinasi Penetapan Daftar Proyek Relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).
31. Koordinasi untuk pemenuhan bahan baku industri alat transportasi, diantaranya: Diskusi bersama Hyundai dan kunjungan lapangan ke PT HLI Green Power sebagai salah satu produsen baterai kendaraan listrik di Indonesia.
32. Koordinasi terlaksananya pertemuan dengan Secretary-General of the Asian Productivity Organization (APO) dan tim terkait Indonesia's National Productivity Masterplan 2025-2029.
33. Koordinasi dalam laporan Program JobStart Indonesia sebagai bagian dari technical Assistance yang diberikan oleh ADB dalam rangka pelaksanaan Policy Action 3.4 atas Policy Based Loan-Boosting Productivity Human Capital Development Program Subprogram.
34. Koordinasi teknis terkait perencanaan teknis rinci pembangunan KPBPB Bintan wilayah Kab. Bintan.
35. Koordinasi penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK.
36. Koordinasi melalui rapat pembahasan status dan perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

37. Koordinasi memalui diskusi potensi pengembangan Pariwisata bersama ADB serta rapat koordinasi pembahasan konektivitas.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam capaian indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- Masih diperlukannya waktu dalam pengumpulan data dan informasi antar sektor untuk menyempurnakan kebijakan.
- Perlunya peningkatan optimalisasi atas tindak lanjut terhadap hasil kegiatan rapat koordinasi.
- Masih belum terdapatnya kata sepakat dalam beberapa kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait penyelesaian isu strategis.
- Memperkuat komunikasi yang efektif antar sektor sehingga lebih cepat dalam perangkuman data dan informasi untuk menyempurnakan kebijakan.

5

Sasaran Strategis 5: *Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 5: *Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas* ditunjukkan dan dihitung berdasarkan capaian 1 indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah 3 dari 4 (Baik):

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
-------------------------	--------	---------------	------------------	-----------

IKU 5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3,25	108,33 %
--	--------	----------	------	----------

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke kementerian/lembaga atau stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil akumulasi dari seluruh unit kerja eselon I. Dimana Indeks ini mampu menggambarkan bagaimana layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah mencapai nilai kategori Puas dengan capaian nilai 3,25. Hal ini menjadi gambaran bahwa koordinasi lintas unit dan juga lintas kementerian/lembaga yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian sudah baik sehingga mampu menghasilkan kebijakan efektif dan juga ini sebagai cerminan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola koordinasi dan efektivitas implementasi pengendalian.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Beberapa hal yang menghambat capaian persentase keberhasilan indeks kepuasan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Masih belum terstandarisasinya waktu penyelesaian isu strategis.
2. Masih sulitnya mendapatkan jumlah responden dalam pengisian survei kepuasan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan ini agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perlunya meningkatkan integrasi data lintas kementerian sehingga waktu penyelesaian isu strategis dapat distandardkan.
2. Perlunya meningkatkan responden kepada kementerian/lembaga lainnya sebagai mitra kerja Kemenko Perekonomian.

Pencapaian Sasaran Strategis 6: **Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas** ditunjukkan dan dihitung berdasarkan capaian 1 indikator kinerja yakni Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

6.1 Nilai Reformasi

**Birokrasi
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian**

Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan proses perubahan dan pembaruan yang dilakukan dalam sistem dan struktur pemerintahan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas birokrasi. Reformasi birokrasi berupaya menyederhanakan proses bisnis dan menghilangkan hambatan birokrasi yang menghambat kinerja pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat maupun daerah) telah berhasil menerapkan prinsip dan program reformasi birokrasi. Indeks ini menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari Komponen RB General (60%) dan Komponen RB Tematik (40%), penilaian ini didasarkan kepada pedoman terbaru dari Kementerian PANRB (Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 dan Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024). Indeks RB dikategorikan dalam nilai sekaligus predikat tertentu.

- Nilai >90 – 100 Kategori AA memiliki predikat Istimewa
- Nilai >80 – 90 Kategori A memiliki predikat Sangat Baik
- Nilai >70 – 80 Kategori BB memiliki predikat Baik
- Nilai >60 – 70 Kategori B memiliki predikat Cukup Baik
- Nilai >50 – 60 Kategori CC memiliki predikat Cukup
- Nilai >30 – 50 Kategori C memiliki predikat Buruk
- Nilai >0 – 30 Kategori D memiliki predikat Sangat Buruk

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh evaluator yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah 90,77. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga TW III 2025, dengan ringkasan:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU 6.1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Nilai	90,77	90,77**	100** %

**hasil realisasi dan kinerja TW III berdasarkan pengukuran activity

Pada tanggal 31 July 2025, Kementerian PAN-RB telah memberikan SE No. 6 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. SE ini disusun untuk menjadi penduan bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB nasional. Dengan

demikian, pelaksanaan RB dapat berjalan secara lebih terintegrasi, terarah dan terukur dalam peningkatan kualitas tata kelola.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya menjadi agenda internal pemerintah, tetapi juga bagian integral dari visi reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kemenko Perekonomian melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian antar lintas Kementerian/Lembaga melalui peningkatan efektifitas program, sinergitas lintas instansi dan penguatan pemberdayaan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain :

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 yang disampaikan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 26 Februari 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh nilai 88,58 atau mengalami kenaikan 3,53 poin dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh capaian RB General yang naik sebesar 4,47 poin, meskipun pada aspek RB Tematik mengalami penurunan sebesar 0,94 poin.

Secara historis, tren nilai RB Kemenko Perekonomian menunjukkan peningkatan konsisten, dari 78,63 (2021), 77,95 (2022), 85,05 (2023) hingga 88,58 (2024). Hasil ini mencerminkan perbaikan kinerja kelembagaan, penguatan sistem kerja birokrasi, serta optimalisasi implementasi program prioritas Reformasi Birokrasi

Berdasarkan rekapitulasi indikator RB General, Proyeksi nilai RB General tahun 2025 adalah 84,01. Beberapa Indikator Reformasi Birokrasi General yang telah menunjukkan capaian optimal antara lain :

- Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General (100%)
- Persentase Penyederhaan Struktur Organisasi (100%)
- Nilai SAKIP 75 (75 dengan bobot penuh 3,00)
- Opni BPK WTP (5 poin)
- Capaian IKU (100%)
- Capaian Prioritas Nasional (100%)

Namun demikian, terdapat indikator yang masih rendah dan perlu perhatian lebih, seperti :

- Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (0,5 dari 3)
- Tindak lanjut Rekomendasi BPK (63,76%)
- Indeks BerAKHLAK (82,67, masih dibawah target 85)
- Survey Penilaian Integritas (81,81 dari target 82)
- Indeks Tata Kelola Pengadaan (75,76 dari target 85)

Berdasarkan rekapitulasi indikator RB Tematik, proyeksi nilai RB Tematik tahun 2025 adalah 6,76. Beberapa indikator Reformasi Birokrasi Tematik yang telah menunjukkan capaian optimal. Kemenko Perekonomian melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian antar lintas Kementerian/Lembaga melalui peningkatan

efektifitas program, sinergisitas lintas instansi dan penguatan pemberdayaan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain :

- RN Pengentasan Kemiskinan
- RB Peningkatan Investasi
- RB Mendorong Hilirisasi
- RB Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan Kesehatan
- RB Mendukung Ketahanan Pangan
- RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan

Kendala dan Upaya Perbaikan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersusunnya rencana aksi RB Tematik yang disebabkan masih belum adanya pedoman dari instansi pembina reformasi birokrasi nasional.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi pembina terkait pelaksanaan agenda dan penilaian nilai Reformasi Birokrasi agar dapat melakukan persiapan yang lebih optimal.
- b. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mempersiapkan penuhan bukti dukung penilaian.